

PANCASILA DALAM PERTARUNGAN KONSEP DAN PRAKTIK

H. Abdul Mun'im DZ

*Wakil Sekjen PBNU
dan Kornas Front Penggerak Pancasila*



Pendahuluan

Memulai perbincangan Pancasila saat ini bukan perkara mudah, ketika falsafah dan ideologi negara ini telah bercampur sedemikian lebur dengan filsafat dan ideologi lain. Karena itu diperlukan pemahaman baru tentang Pancasila, sebuah pemahaman yang barangkali belum dirumuskan oleh para perumus maupun para penafsir Pancasila di masa lalu. Hal itu penting untuk menjelaskan makna dan relevansi Pancasila di era global sekarang ini. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan terinci, agar menjadi jelas mana hakekat dan mana aksesoris dan mana perangkat. Dengan demikian, pembicaraan bisa dilakukan secara artikulatif dan proporsional. Artikel ini bukan ditulis oleh seorang akademisi atau pengamat yang *detachemen* (berjarak)

dengan objek yang dikaji, melainkan ditulis seorang praktisi yang sehari-hari bergerak dalam mempancasilakan masyarakat. Bisa dipahami kalau tulisan ini lebih merupakan serangkaian penegasan, petunjuk dan arahan (*da'wah wat tarjih wal irsyad*), ketimbang analisis atau pengamatan yang berjarak.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya urutan sila Pancasila mulai sila pertama hingga sila terakhir telah mencerminkan urutan logis yang sistematis dalam kerangka filosofis. Dimulai dari dasar kehidupan, yaitu sila ketuhanan dan kemanusiaan, lalu dilengkapi dengan sarana, yaitu sila persatuan dan permusyawaratan. Kemudian sampai pada puncak tujuannya yaitu tercapainya Keadilan. Keadilan sosial dengan demikian menjadi tujuan

utama Pancasila. Di situ sekaligus tertegaskan mana *qaidah*, mana *wasilah* dan mana *ghoyah* (sendi, dan sarana dan tujuan). Rumusan itu belakangan kemudian dibingkai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mengikat sila-sila itu sebagai satu kesatuan dan sekaligus membingkai keragaman dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Dengan adanya persatuan itulah keadilan bisa dicapai. Bukan sebaliknya.

Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi negara telah lama menjadi bahan perdebatan, sejak menjelang kelahirannya hingga saat ini. Perdebatan itu terjadi bukan hanya karena banyak yang tidak sepakat dengan Pancasila, melainkan juga banyaknya pemahaman dan tafsiran terhadap Pancasila. Kalaulah Pancasila diterima secara luas dan masif, tetapi bentuk penerimaan itu juga bervariasi. Ada yang penuh dengan keseriusan dengan menggali sumber-sumber serta relevannya saat ini, tetapi ada yang menerima sambil lalu, tanpa mau mengerti apa yang diterima, bagaimana konsekwensi dalam kehidupan bernegera dan dalam bermasyarakat sehari-hari.

Bahkan belakangan ini banyak orang yang dengan antusias menggemakan Pancasila, tetapi karena kurang pedulinya pada Pancasila, sehingga dengan mudah mencampuradukkan dengan ideologi lain yang secara diametral berseberangan. Atau ada kelompok yang memahami Pancasila dari aspek tertentu saja, tidak secara utuh. Sebagai contoh di negeri yang sudah jauh menyimpang dari

Pancasila ini terjadi berbagai macam persoalan sosial dan politik yang bisa mengancam stabilitas pemerintahan dan mengancam sendi bernegara. Di satu sisi terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi, serta kesenjangan ekonomi yang sangat tajam, sebagai ikutannya muncul, kriminalitas tinggi. Di sisi lain munculnya gerakan Islam puritan yang ingin mengembalikan kehidupan berdasarkan agama. Mereka itu memaksakan kehendaknya secara radikal dengan kekerasan, sehingga mengganggu kerukunan hidup beragama.

Terhadap fenomena ini banyak kelompok yang mencoba melihatnya sebagai penyimpangan Pancasila. Pada Pancasila mengajarkan toleransi, tetapi masyarakat berkembang bertentangan arah dengan kehendak Pancasila tersebut. Solusinya dengan demikian agar masyarakat kembali memahami makna Pancasila yang mengajarkan toleransi. Sementara banyak pihak terutama di kalangan lembaga studi atau pusat kajian Pancasila, baik yang di Parlemen dan di Perguruan Tinggi yang menyaksikan pemberlakuan sistem demokrasi liberal yang melahirkan sistem politik dan ekonomi liberal yang mengakibatkan ketidakadilan sosial ini dianggap bukan masalah. Padahal sistem itu telah menimbulkan persaingan keras dan eksploitasi tanpa ada toleransi. Juga mengakibatkan ketimpangan sosial yang ekstrem sehingga melahirkan berbagai macam diskriminasi baik berdasarkan ekonomi maupun status sosial, sehingga banyak korban termarjinalisasi.

Sikap keras dan tindakan yang disebut intoleran itu sebagian besar merupakan reaksi atas terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan yang merajalela itu. Perlawanan terhadap gerakan itu bisa berupa maraknya kasus kriminal, kekerasan dan sebagian muncul dalam gerakan keagamaan. Dengan hilangnya salah satu prinsip Pancasila yaitu Keadilan sosial, maka terjadi pelanggaran sila yang lain, terutama kemanusiaan dan persatuan, karena tidak ada asas permusyawaratan dan gotong royong. Di situ diskriminasi, eksploitasi dan represi terjadi secara sistemik dan masif. Sebagai reaksinya muncul gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan dengan berbagai bentuk dan eskpresinya. Gerakan radikal muncul bukan semata karena menyimpang dalam memahami agama, tetapi juga dipicu oleh faktor ketidakadilan. Ini tesis yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Varian Pemahaman Pancasila

Bagi NU penerimaan Pancasila merupakan konsekuensi dari penerimaan paham ahlussunnah wal jamaah. Karena bagi NU rumusan Pancasila itu mulai dari sila pertama hingga sila kelima merupakan cerminan ajaran Aswaja yang dianut oleh NU. Pancasila diletakkan dan dipahami sebagai sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada umumnya kalangan religius dan kalangan nasionalis bersikap seperti itu. Itulah yang disebut sebagai kelompok substansialis, yang

menempatkan Pancasila sebagai nilai luhur yang menjadikan sebagai *weltanchoung* (pandangan hidup) serta rujukan dalam berbangsa dan bernegara. Kelompok ini tercatat sebagai anggota BPUPK dan PPKI yang memang sejak awal terlibat aktif dalam perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara tahun 1945.

Berbeda dengan kelompok komunis yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok sosialis (PSI), yang tidak terlibat dalam perumusan Pancasila, mereka itu melihat Pancasila hanya sebagai sarana pemersatu bangsa. Ketika bangsa sudah bersatu, Pancasila tidak lagi diperlukan. Dengan demikian Pancasila bukan sebagai nilai luhur yang menjadi pandangan hidup dan rujukan dalam bernegara. Kelompok PKI tetap menggunakan marxisme dan leninisme atau maoisme sebagai rujukan dan cita cita mereka. Demikian kelompok sosialis rujukan dalam bernegara mereka bukanlah Pancasila, melainkan dua rujukan yang saling bertentangan, yaitu pertama, secara resmi mereka sebagai partai yang berhaluan marxisme, tetapi dalam perilaku sehari hari mereka mempraktikkan gaya hidup serta kebijakan yang bersifat liberal dan dalam politik pro-Barat. Dengan menempatkan Pancasila bukan sebagai sumber nilai, tetapi hanya sarana pemersatu, mereka itu disebut dengan kelompok instrumentalis.

Bagi kaum substansialis seperti NU, Pancasila itu adalah lima sila yang tertera dalam dada Garuda. Dengan sila

Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila yang lain, sehingga Pancasila menjadi pandangan yang religius. Bagi kaum instrumentalis Pancasila bukan sila yang tertera di dada Sang Garuda, melainkan apa yang tertera di kaki Sang Garuda, yaitu Bhinneka Tungga Ika. Tetapi kaum instrumentalis, tidak mengambil prinsip itu secara utuh melainkan hanya sepotong saja, yaitu Bhinneka atau Kebhinekaan, dengan mengabaikan aspek keikaan. Kebhinekaan itu kemudian dipahami dan ditafsirkan dalam konteks pemikiran liberal, yaitu pluralisme diikat oleh keikaan. Padahal dalam konteks Pancasila, Kebhinekaan dipelihara dan tetap dijaga dengan prinsip keikaan.

Bagi kaum substansialis Bhinneka Tunggal Ika bukan sarana, tapi sebuah prinsip. Bangsa Nusantara ditakdirkan menjadi bangsa majemuk, baik dari segi agama, suku bangsa, bahasa dan budaya, sehingga menjadi bangsa yang kaya penuh nuansa. Karena itu *kebhinnekaan* tersebut diikat dan dijaga dengan sebaik-baiknya dengan nilai *keikaan*. Kalaupun ada perbedaan, tetapi harus diikat oleh satu prinsip yang sama. Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh perumusny, yaitu Empu Tantular bahwa *Bhinneka Tunggal Ika tan hana dhama mangruwo*. Walaupun berbeda tetapi tidak boleh ada pertentangan, karena itu diikat dalam satu ikatan nilai¹. Dalam konteks ini sila

sila itu sendiri merupakan ikatan dalam kebhinekaan itu.

Pertama, bangsa Indonesia boleh beragama apa saja, boleh berorganisasi apa saja, boleh berkepercayaan apa saja, tetapi semuanya harus menganut kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, ateisme sebuah pandangan yang melawan teisme tidak diperbolehkan, karena tidak mengakui prinsip ketuhanan. *Kedua*, Pancasila memberikan kebebasan pada individu, tetapi kebebasan itu terikat oleh nilai kemanusiaan, bukan manusia yang liar, anarkhi, melainkan manusia yang beradab, bermoral, sesuai dengan moral agama dan tradisi. *Ketiga*, seseorang bebas berorganisasi dan berpolitik, tetapi terikat oleh satu kesepakatan, yaitu terikat dalam koridor keindonesiaan dan seterusnya.

Bagi kelompok instrumentalis yang memahami Bhinneka tanpa Tunggal Ika. kebhinekaan dimaknai sebagai pluralisme, perbedaan dipelihara sebebaskan-bebasnya tanpa ikatan keikaan. Tentu ini sangat berbahaya karena akan terjadi benturan dan pertikaian. Ini ibarat sebuah kebun binatang yang mencampur antara ayam dengan musang, kambing dengan serigala dengan singa, buaya, kijang, harimau menjadi satu. Tentu secara perlahan ayam, kambing, kijang akan menjadi korban dan terakhir akan terjadi pertarungan antara singa, serigala dan harimau. Pandangan pluralisme demikian terjadi dalam politik dan ekonomi yang berprinsip bukan *gotong royong* sebagaimana dikehendaki

1 Slogan yang dikutip dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular itu menjadi sangat populer setelah digunakan sebagai bingkai dalam Pancasila. Lihat, Muhammad Yamin, *Sapta Parwa: Tatanegara Majapahit Jilid 1*, Penerbit Prapanca, Jakarta, 1960, hlm. 69.

Pancasila, tetapi malah menetapkan prinsip *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi orang lain). Para aktor politik, aktor ekonomi menjadi *predator* (pemangsa) satu terhadap yang lain.

Sebagai contoh bagaimana Kementerian Koperasi setetes dua tetes membiayai usaha kecil, sementara Kementerian Perdagangan dan Pemda mengeluarkan Perda yang menyapu bersih usaha kecil dengan tuduhan ilegal. Hal itu dilakukan semata atas desakan para konglomerat untuk membasmi pesaingnya. Kesemuanya ini sebenarnya mengulang perdebatan di masa lalu, yang mencerminkan pertarungan antara perjuangan nasional dengan pengaruh kolonial, yang menjadi pertarungan abadi. Perubahan konsep pemahaman Pancasila berimplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat bawah menjadi korban tanpa perlindungan.

Saat ini terdapat dua pandangan tentang Pancasila yang saling bertentangan, yaitu antara kelompok liberal dengan kelompok Islam radikal. Kelompok liberal menggunakan Pancasila secara teknis pragmatis dan sekadar tameng untuk menjalankan agenda yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Apalagi ketika Pancasila ditetapkan sebagai ideologi terbuka, maka diisi dengan dengan ideologi lain (kapitalis) yang bersebarangan². Sementara kelompok

Islam radikal yang selama ini menolak konsep Negara ke-tuhanan Republik Indonesia (NKRI) karena mereka memperjuangkan khilafah Islamiyah. Belakangan ini mereka mengubah strategi mereka dengan menawarkan konsep NKRI bersyariah. Sebuah NKRI yang bukan berdasarkan Pancasila, melainkan berdasarkan syariat Islam. Walaupun NKRI mereka pertahankan tetapi secara perlahan Pancasila disingkirkan.

Perdebatan Konsep Pancasila

Keterlibatan para ulama NU dalam urusan Pancasila terjadi sejak sebelum kemerdekaan, yaitu ketika bangsa ini meminta KH Hasyim Asyari sebagai sesepuh dan pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia untuk terlibat dalam BPUPK. Karena sudah uzur, beliau mendelegasikan tugas negara itu pada dua orang kader NU, yaitu KH Wahid Hasyim dan KH Masykur. Namun demikian para ulama di luar BPUPK tetap membantu keduanya dalam menjalankan tugas. Mengenai dasar negara KH Hasyim berpesan agar negara ini didirikan berdasarkan prinsip tauhid. Karena itu, saat dibentuk Tim Sembilan untuk menyempurnakan Mukadimah Undang-Undang Dasar, khususnya menyempurnakan Pancasila yang ditawarkan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, KH Wahid Hasyim mengusulkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, dan menjiwai

2 Lihat *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, FISIP UI dan TEMPO, Jakarta 2006, hlm. 433.

sila-sila yang lain.³ Bahkan konsep dasar Mukadimah UUD 1945 itu dirumuskan bersama oleh KH. Wahid Hasyim, KH Imam Mursyid Madiun dan KH Dimiyati Pacitan, yang merupakan mitra diskusi KH Wahid Hasyim dalam masalah keagamaan dan terutama kenegaraan.⁴

Nuansa keislaman terutama kepesantrenan semakin jelas dalam Mukadimah dan Pancasila itu ketika dilakukan kajian dan diperiksa secara bahasa. Terbukti *uslub* atau gaya bahasa Mukadimah tersebut mencerminkan gaya bahasa pesantren yang dipengaruhi kuat oleh gaya bahasa Arab, dengan selalu menengahkan *ta'yid*, seperti kata “sesungguhnya”, atau menggunakan kata sambung “dan” di depan kalimat, yang tidak lazim dalam bahasa Inggris atau Belanda. Pada alinea pertama dimulai dengan *ta'yid* bahwa sesungguhnya, Alinea kedua dimulai dengan kata sambung Dan. Alinea tiga dengan kalimat yang sangat tegas yakni : *Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*, sebuah ungkapan khas pesantren yang sangat religius. Dalam paragraf itu kemudian dituangkan dasar negara Pancasila yang merupakan cerminan kehidupan

yang sosialis dan religius pula.⁵ Karena itu, Pancasila mudah dipahami dan mudah diterima oleh bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim dan khususnya kalangan ulama NU.

Perdebatan soal Pancasila menyeruak keluar ketika persoalan kenegaraan yang dianggap selesai itu dibuka lagi pada masa sidang Konstituante 1956. Terlebih saat dimulainya pembahasan mengenai dasar negara pada tahun 1957, perdebatan menjadi sangat seru. Hadirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadikan perdebatan semakin panas, terutama ketika PKI yang berhaluan Marxis itu tiba-tiba masuk dalam blok Pancasila. Tentu saja pilihan itu mengagetkan pihak lain terutama kalangan NU. Karena itu, kalangan NU yang pada dasarnya telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, akhirnya berubah pandangan untuk memilih Pancasila, apalagi Pancasila yang sudah dikomunikasikan. Karena itu, NU akhirnya memilih Islam, bukan dasar Islam puritan tetapi berdasarkan Islam Pancasila. Sebagaimana kecurigaan NU, akhirnya pendirian PKI tentang Pancasila ketahuan juga, yaitu saat DN Aidit, Ketua PKI memberikan ceramah di hadapan kader revolusi menjelaskan bahwa Pancasila hanya sebagai ideologi pemersatu, kalau masyarakat dan negara sudah bersatu, Pancasila tidak dibutuhkan lagi.

3 Saya sengaja tidak lagi terpaku pada Sumber resmi sebagaimana yang termaktub dalam Buku Muhammad Yamin, *Risalah Persiapan UUD 1945*. Saya menggunakan sumber alternatif sumber lisan dari beberapa orang kiai. Wawancara dengan KH. Abdurrahman Badjuri, Purworejo tgl. 19 April 2017 dan 17 Juli 2017 dan 10 Oktober 2017. Beliau salah seorang Santri KH Hasyim Asy'ari yang merekam perbincangan serius antara KH. Hasyim Asyari dengan KH. Wahid Hasyim, saat proses perumusan Pancasila.

4 Keterangan dari KH Imam Zuhdi Pengasuh Peantren Sabibil Muttaqin Takeran Magetan pada 7 Februari 2015 di Panekan Magetan.

5 Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid Pertama*, Penerbit Kementerian Penerangan RI, Jakarta, 1959, hlm. 406-759.

Pandangan Aidit tentang Pancasila yang instrumental itu dikritik keras oleh kelompok lain, baik nasionalis maupun Islam. Kritik muncul tidak hanya di media, tetapi disuarakan keras dalam berbagai sidang Konstituante. Akhirnya, Aidit menjadi bulan-bulanan massa dan politik. Serangan-serangan pedas yang dilancarkan terhadap DN Aidit tidak membuat kader PKI goyah dalam ideologi, berkat adanya pembajaan diri yang terus menerus dilakukan PKI. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari serangan yang terhadap DN Aidit tersebut, maka CC PKI memutuskan untuk terus-menerus melakukan pembajaan diri dan pendidikan ideologi di kalangan PKI. Hal itu dilakukan sebagai tameng ideologi untuk menghadapi indoktrinasi ideologi lain, yaitu Pancasila.⁶

Dalam pidatonya di Konstituante 11 November 1959, Jubir Fraksi PKI yaitu Ir. Sakirman mengusulkan agar Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* itu diganti dengan sila *Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Hidup*.⁷ Kebebasan beragama di situ dimaksudkan juga adalah bebas untuk tidak beragama (ateis) sebagaimana yang digariskan PKI. Maka tidak aneh kalau kemudian muncul usulan dari anggota Konstituante bernama Asmara Hadi mengusulkan agar

propaganda anti agama diberi kebebasan, sebab hal itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.⁸ Penegasan itu semakin mengkhawatirkan umat Islam terhadap manuver PKI dan simpatisannya dalam berpancasila.

Hal itu membuat NU yang berada di blok Pancasila terpaksa memilih jalur lain, yaitu blok Islam. Ketika Pancasila hendak dikomunikasikan, NU masuk dalam blok Islam bersama Masyumi, PSII, Perti dan sebagainya. Tetapi konsep keislaman NU sangat berbeda dengan Masyumi. NU menghendaki Pancasila dengan nuansa Islam, atau Islam Pancasila. Sementara Masyumi menghendaki negara berdasarkan Syariat Islam. Strategi NU itu dibaca oleh PKI. Karena itu, PKI melalui juru bicaranya di Konstituante, yaitu Ir. Sakirman, menyatakan bahwa PKI setuju dengan konsep negara Islam yang dirumuskan oleh NU, sebab konsep negara Islam model NU sebenarnya adalah negara Pancasila. Tentu ini berbeda dengan negara Islam versi Masyumi.⁹ Memang sejak terjadi perdebatan mengenai dasar negara itu, NU melalui serangkaian rapatnya telah mengkonsep apa yang disebut dengan Pancasila Islam, sebagai *counter* terhadap Pancasila Komunis. Dalam sebuah *Risalah* yang dikeluarkan oleh KH Ahmad Shiddiq,

6 Lihat KH Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Gunung Agung, Jakarta 1987, hlm. 240. Baca juga Laporan Khusus, *Fakta di sekitar Gerakan 30 September*, Pusat Penerangan TNI AD, Jakarta 1965, hlm. 420-421.

7 Panitia Konstituante, *Risalah Perundingan Konstituante RI Tahun 1957* Jilid V, Kementerian Penerangan RI, Jakarta 1959, hlm. 260.

8 Lihat Panitia Konstituante, *Risalah Perundingan Konstituante RI*, Tahun 1958, Jilid, IV, hlm. 1827. Kebebasan propaganda anti agama, ini yang oleh aktivis LSM saat ini disebut sebagai kebebasan menghina atau menistakan agama.

9 Lihat *Risalah Perundingan Konstituante RI*, Tahun 1958, Jilid, IV, hlm. 1734.

Pancasila dalam Pertarungan Konsep dan Praktik

telah mendesak agar NU segera menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.¹⁰ Berbagai usulan itu kemudian dibicarakan serius dalam rapat NU pada 28 Januari 1959, yang kemudian difinalkan dalam rapat berikutnya, 20 Februari 1959.

Mengenai keberadaan Piagam Jakarta, NU mengambil jalan tengah, antara kelompok yang ingin menerapkan Piagam Jakarta secara resmi harfiah, yaitu kelompok Masyumi dan kelompok yang menolak Piagam Jakarta, kalangan non Muslim dan kalangan nasionalis sekuler. NU mengambil jalan tengah, mengusulkan agar Piagam Jakarta memang tidak perlu diterapkan secara formal, tetapi juga tidak boleh dihilangkan sama sekali dokumen bersejarah itu. NU mengambil jalan tengah, yaitu agar Piagam Jakarta dijadikan babon dan jiwa UUD 1945.¹¹ Di tengah kebuntuan Konstitusi itu, NU mampu memberikan solusi dengan mengajukan jalan keluar yang bisa diterima semua pihak. Ini langkah yang luar biasa yang sama sekali tidak dipikirkan oleh politisi lain, termasuk Bung Karno sendiri. Karena itu Bung Karno segera mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang isinya secara tegas memasukkan usul NU, yaitu;

Bahwa Kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni

*1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan rangkaian/kesatuan dengan Konstitusi tersebut.*¹²

Dengan kembali ke UUD 1945 serta kembali menegaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, perdebatan mengenai Pancasila pada babak ini telah selesai, ditandai dengan kembalinya Kabinet Presidensiil. Situasi menjadi relatif stabil karena kekuasaan dipegang oleh orang kuat, yaitu Bung Karno. Untuk membersihkan dari sisa-sisa demokrasi liberal parlementer, Bung Karno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin. NU menerima secara kritis gagasan itu dengan mengingatkan bahwa tekanannya pada demokrasi agar dinamis, jangan pada kepemimpinan karena akan mandek dan otoriter.¹³ Hal sama juga disampaikan KH Wahab Chasbullah dalam Sidang Konstituante. NU menerima kebijakan itu secara kritis apalagi saat itu Indonesia masih berlaku keadaan darurat perang, sehingga menghalangi aktivitas sosial dan politik warga. Tetapi NU memahami pada dasarnya demokrasi Pancasila memang demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat

10 Keterangan dari KH. Muchith Muzadi, Naskah itu kemudian ditawarkan dalam Konferensi NU Jawa Timur, dan kemudian ditegaskan dalam Munas dan Mukhtar NU di Situbondo.

11 Catatan *Rapat Harian PBNU* 20 Februari 1959.

12 Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid III*, Penerbit Kementerian Penerangan RI, Jakarta 1960, hlm. 661-667.

13 .Pernyataan NU secara Resmi di sampaikan baik di forum DPRGR, maupun Sidang Konstituante. Anggota DPRGR dari Fraksi NU KHA. Sjaichu. Kembali Ke UUD 1945 dan Demokrasi terpimpin, pada tanggal 24 Maret 1959. Pernyataan serupa disampaikan oleh KH. Wahab Chasbullah dan KH. Saifuddin Zuhri dalam Sidang Konstituante. 4 Mei 1959. Juga dalam *Risalah Perundingan Konstituante* Jilid I, 1959, Jakarta, hlm. 223.

kebijaksanaan.

Ketika Bung Karno jatuh dan Demokrasi Terpimpin yang diterapkan juga mulai runtuh, NU mengusulkan agar Indonesia kembali pada demokrasi Pancasila. Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berusaha menerapkan demokrasi Pancasila sebagaimana diusulkan NU yang merupakan demokrasi yang sesuai dengan sejarah dan karakter bangsa. Secara tegas pada tahun 1967, pada Mukdam ke-24 di Bandung, NU mengeluarkan Maklumat atau Deklarasi Demokrasi Pancasila. Sebagai langkah lanjut untuk memperbaiki sistem politik yang hancur akibat peristiwa 1965, yang memporakporandakan tatanan politik nasional. Dalam Maklumat tersebut dijelaskan bahwa :

Pertama, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. Kedua, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, melalui lembaga-lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih di dalam pemilihan umum yang bebas dan demokratis.

Konsep demokrasi yang diusulkan NU itu juga menyangkut kebebasan berkumpul dan kebebasan berpolitik. Hanya saja Orde Baru muncul sebagai kekuatan otoriter yang membatasi kebebasan, justru atas nama Pancasila. Pancasila bukannya menjadi pedoman hidup dan falsafah bangsa, melainkan

menjadi sarana diskriminasi dan stigma bagi kelompok lain yang berbeda pandangan. Sebagai kelompok yang kritis pada Orde Baru, NU sendiri tidak lepas dari kecurigaan Orde Baru, sebagai kelompok komunis dan nasionalis Soekarno. Walaupun dalam tekanan, tetapi NU tetap loyal pada Pancasila, dan berusaha menafsirkan dan menerapkan Pancasila sesuai dengan penafsiran sendiri. NU menolak keras penafsiran tunggal yang dimonopoli oleh pemerintah, karena itu NU menolak pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dianggap NU sebagai upaya memonopoli penafsiran Pancasila, sehingga yang beda dengan pemerintah dianggap anti Pancasila.¹⁴ Padahal kelompok Pancasila, baik NU maupun lainnya memiliki tafsir sendiri atas Pancasila. Ini merupakan tantangan besar dari dalam untuk mengembangkan demokrasi Pancasila.

Tidak lama berselang dunia digoncang oleh revolusi Iran, rezim otoriter Raja Iran Reza Pahlevi dukungan Amerika Serikat ditumbangkan oleh revolusi rakyat yang dipimpin oleh pemimpin spiritual Ayatullah Khomeini pada 1979, yang kemudian mengganti dengan negara Islam. Setelah itu, Khomeini mengeksport Revolusi Islam ke seluruh dunia. Revolusi Iran segera menginspirasi gerakan Islam di seluruh dunia untuk bangkit. Tidak terkecuali Islam di Indonesia. Berbagai kelompok Islam lama, seperti Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) dan

¹⁴ Lihat, Syamsuddin Harris, *PPP dan Politik Orde Baru*, Penerbit Grasindo, Jakarta. 1997, hlm. 47.

juga Negara Islam Indonesia (NII), segera berkonsolidasi menyambut revolusi Khomeini. Saat itu keberadaan Pancasila mulai digugat, dianggap sebagai *toghut* (setan). Ini adalah istilah khas ciptaan Khomeini untuk menyebut warisan Shah Iran dan juga untuk menyebut Amerika dan sekutunya sebagai *thoghut*.

Munculnya gerakan Islam radikal sisa DI-TII dan NII serta Komando Jihad itu tidak hanya meresahkan pemerintah, tetapi juga membuat prihatin kalangan NU. Sebab bagaimanapun penggantian asas dan ideologi negara yang sudah disepakati bersama ini akan membuat pertikaian berkepanjangan, bahkan bisa mengarah terjadinya pertumpahan darah. Beberapa kiai sepuh selalu bertemu untuk mengantisipasi perkembangan yang rawan ini. Termasuk mengantisipasi keinginan pemerintah untuk mencegah pengaruh revolusi Khomeini dengan memaksa semua organisasi menggunakan asas Pancasila. Para ulama melakukan langkah antisipatif bersamaan dengan pelaksanaan Munas NU di Situbondo tahun 1983. Dalam pertemuan itu, NU mengeluarkan *Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam*, sebuah keputusan strategis dan peristiwa bersejarah yang tidak hanya menjadi rujukan warga NU dan umat Islam, tetapi menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam memahami Pancasila.

Dalam Deklarasi itu dijelaskan bahwa: *Pertama*, bahwa Pancasila bukan agama dan tidak akan digunakan untuk menggantikan agama; *Kedua*, penegasan mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tauhid; *Ketiga*, bahwa ajaran Islam meliputi akidah dan syariah, yang

mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan antara sesama manusia. *Keempat*, bahwa mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan Islam. *Kelima*, sebagai konsekwensinya NU wajib mengamalkan dan mengamankan Pancasila.¹⁵

Keputusan NU ini bukan sikap oportunistik, tetapi merupakan aspirasi dan sekaligus cermin dari keprihatinan dan sekaligus kepedulian para ulama terhadap keutuhan dan keamanan serta ketenteraman negeri ini. Karena itu, KH Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa penetapan NU terhadap Pancasila sebagai asas organisasi tidak hanya atas pertimbangan *siyasi* (politik) melainkan juga atas pertimbangan *syar'i* (agama).¹⁶ Apalagi yang memutuskan adalah ulama sepuh yang sangat kharismatik seperti KH As'ad Syamsul Arifin, KH Ali Maksum, KH Ahmad Siddiq, KH Mahrus Ali, KH Hamid Kajoran dan lain sebagainya. Keputusan itu diterima dengan lega secara luas, tidak hanya secara harfiah *labil lafdzi* (secara taktik, pragmatis dan instrumental), tetapi juga menerima secara *ma'nal murod* (sesuai dengan substansi).¹⁷

Gerakan Membela Pancasila

Tantangan terhadap Pancasila tidak hanya terjadi pada tingkat konsep, melainkan dalam bentuk praktik atau

15 Lihat Abdul Mun'im DZ, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Penerbit LTN PBNU, Jakarta 20011, hlm. 95-96.

16 Panitia Muktamar, *Laporan Munas dan Muktamar NU Ke-27 Di Situbondo*. Jakarta 1984.

17 Penjelasan ini disampaikan pada Munas Situbondo 1983,

gerakan politik bahkan militer. Dengan demikian perjuangan penegakan nilai luhur tidak hanya di level konsep, tetapi dilanjutkan di lapangan sebagai perjuangan fisik, sehingga tidak ada kesenjangan antara konsep dan praktik dan antara pikiran dengan tindakan. Tantangan terhadap Pancasila terjadi karena saat muncul apa yang dikhawatirkan Empu Tantular sebagai *hana dharma mangruwo*, (munculnya penyimpangan terhadap prinsip). Ketika mulai mengadopsi prinsip lain, untuk melawan prinsip sendiri. Sesuai dengan petunjuk Sang Empu, maka harus mengambil tindakan *sirna sahana* (melenyapkan) terhadap kelompok yang melakukan penyimpangan.

Kalau Pancasila sebagai bentuk ideologi, maka NKRI sebagai konsep teritori (kewilayahan) dan tata nilai, yang keduanya merupakan satu kesatuan. Dalam konsep NU, perpaduan keduanya dirumuskan dengan sangat jelas bahwa: "Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan Pancasila) adalah merupakan bentuk upaya final seluruh *nation* (bangsa) teristimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara.¹⁸ Karena itu, wajib bagi NU dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk mempertahankan dan membelanya. Pernyataan itu menegaskan apa yang telah dilakukan dan apa yang sedang dan akan dilakukan NU dalam menghadapi tantangan terhadap ideologi, nilai, dan teritori.

Sebagai kelompok Islam nasionalis,

NU sangat gigih dalam membela dan mendirikan negara, baik secara teritori maupun secara ideologi. Ketika teritori Republik ini terancam oleh hadirnya sekutu, dengan tegas NU menyerukan perlawanan terhadap hadirnya tentara sekutu dengan mengeluarkan fatwa Jihad, bahwa wajib atau *fardlu ain* hukumnya perang jihad melawan Penjajah. Sehingga Muncul Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang kemudian memuncak menjadi perang besar 10 November 1945 yang melahirkan Hari Pahlawan, merupakan catatan perjuangan kaum santri yang dikomandoi NU dalam menjaga teritori negara. Begitu pula saat datangnya agresi Belanda pertama dan kedua, kembali NU melaksanakan perang Sabil melawan penjajah dengan mengeluarkan Resolusi Jihad kedua tahun 1946 di Mukhtar Purwokerto 1946.

Demikian pula saat negara ini mendapat ancaman secara ideologi dan teritori dengan munculnya pemberontakan komunis yang memproklamasikan Republik Soviet di Madiun tahun 1948, yang berarti menolak Proklamasi 1945 beserta Pancasila dan NKRI. NU melakukan perlawanan dengan mengerahkan pasukan santri untuk menghadapi pemberontakan dan pembantaian yang dilakukan oleh PKI. Tidak lama setelah itu muncul perlawanan terhadap Pancasila dan NKRI yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam (DI) yang berlatar belakang Islam modernis yang puritan itu memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). NU segera melakukan penolakan dengan mengeluarkan fatwa bahwa gerakan DI-TII mendirikan NII merupakan tindakan

18 Lihat Laporan Mukhtar NU ke 27, hlm. 86.

bughot (memberontak) karena itu harus diperangi. Apalagi gerakan tersebut bersekongkol dengan penjajah Belanda untuk meruntuhkan negara Indonesia berdasarkan Pancasila.¹⁹ Belum lagi banyak kiai pesantren NU yang menjadi korban keganasan pasukan DI-TII.

Tidak lama berselang muncul pula perlawanan terhadap NKRI yang dilakukan oleh kelompok Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Mereka melakukan perlawanan dengan pemerintah Republik Indonesia tahun 1958. Terhadap ancaman itu, NU dengan tegas menyatakan bahwa tindakan PRRI/Permesta itu *bughot* (pemberontakan), maka harus ditumpas, karena melawan pemerintah yang sah,²⁰ apalagi pemberontakan itu bersekongkol dengan negara asing, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. NU tetap bersikap tegas walaupun pemberontakan itu dilakukan oleh elite Masyumi, seperti Muhammad Natsir, Safruddin Perwiranegara dll, juga para elite PSI (Partai Soasislis Indonesia), seperti Prof. Sumitro Djojohadikusumo.²¹ Dalam soal gangguan bahkan ancaman ideologi dan teritori jelas NU tidak kenal kompromi. Penegasan itu disampaikan ketika Presiden masih bimbang menghadapi pemberontakan yang dilakukan sejawatnya sendiri itu. Terhadap

pemberontakan, NU bertindak tegas, tetapi NU melindungi dan memberikan santunan pada warga Masyumi dan Muhammadiyah yang terkena pengejaran dan penangkapan akibat keterlibatannya dalam pemberontakan berdarah itu.²²

Rupanya tantangan terhadap Pancasila tidak berhenti di situ, terus berlanjut hingga menjelang pertengahan dasawarsa 1960. Keinginan PKI untuk mengganti sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila kebebasan beragama, termasuk di dalamnya kebebasan untuk tidak beragama (ateis) dan bebas berpropaganda anti agama (anti teis) yang selama ini hanya gertakan, kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. PKI yang telah beberapa kali melakukan pemberontakan dapat ditumpas, maka setelah mengadakan persiapan dengan matang, mereka berusaha kembali melakukan perebutan kekuasaan pada 30 September 1965. Berusaha mengganti negara Pancasila dengan negara komunis marxis. Seraya melakukan *dharma mangruwa* (bersengkongkol dengan pihak asing, yaitu RRT), NU segera bertindak *sirna sahana* atau dalam kaidah fiqihnya *adl-dlararu yuzalu* (ancaman harus disingkirkan). NU mengeluarkan seruan pada tanggal 3 Oktober 1965, agar PKI yang melakukan pemberontakan itu segera dibubarkan, dan menangkap gembongnya yang banyak membantai kiai. Dalam waktu singkat, pasukan kiai bisa menundukkan PKI, sehingga Pancasila dan NKRI

19 Baca buku Biografi KH. Masykur, dan Biografi KH. Idham Cholid, *Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2008, hlm. 300.

20 Lihat pernyataan KH Wahab Hasbullah, yang ditegaskan kembali dalam Mukhtamar NU Ke 22 di Jakarta, 18 Desember 1959.

21 Kenneth Conboy, *Feet To The Fire, CIA Covert Operation in Indonesia, 1957-1958*, Naval Institute Press, Maryland, tt, hlm. 85.

22 Kiai Muslih mendapatkan tugas dari PBNU untuk melindungi para keluarga PRRI agar tidak ditangkap oleh TNI dan PKI. Laporan Mukhtamar NU ke XXII, Desember 1959.

selamat kembali.²³ Perlawanan NU terhadap PKI yang bermula sejak Pemilu tahun 1955, berlangsung terus hingga saat ini. Perlawanan ini bersifat politis dan ideologis. Sebagai pemberontak, PKI harus dihukum setimpal, tetapi sanak saudaranya harus dilindungi hak hidup mereka, sejauh tidak meneruskan tindakan subversif leluhurnya. Karena itulah, NU melindungi dan menyantuni ini sebuah proses rekonsiliasi alami yang telah lama terjadi, yakni sejak tragedi itu selesai. Dengan demikian, bekas keluarga PKI menjadi warga negara yang utuh dan terhormat.²⁴

Melawan Retorika Pancasila

Rezim Orde Baru Soeharto adalah rezim komprador yang merupakan kepanjangan tangan dari kapitalisme global. Karena itu seluruh konsep dan pelaksanaan pembangunan dikendalikan mereka sebagai negara donor. Dengan demikian, semangat proklamasi telah tergadaikan. Apalagi dengan jelas beberapa elite Orde Baru menyerahkan kedauletan serta sumber daya negeri ini pada para kapitalis dalam sebuah pertemuan di Geneva 1967, yang dipimpin Adam Malik, Sadli, Emil Salim dkk, saat itulah berbagai perusahaan strategis negara diserahkan pada raksasa asing seperti Unilever, Caltex, Goodyear,

BAT, Shell dan sebagainya.²⁵ Tetapi untuk memperkuat legitimasinya, negara Orde Baru ini merumuskan jati dirinya sebagai rezim yang ingin menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Walaupun seluruh programnya dikendalikan oleh negara donor terutama Amerika Serikat, yang secara sistematis menggeser Pancasila.

Pergantian rezim Soekarno ke dalam rezim Soeharto ini merupakan sebuah gerakan revolusi, yaitu dari negara sosialis Pancasila menjadi negara kapitalis. Karena Soeharto masih campur tangan, maka kapitalismenya dianggap semu atau *ersatz capitalism*. Untuk mempermudah beroperasinya kapitalisme Amerika ini, Amerika meminta Soeharto untuk menghidupkan kembali mitra kuno kapitalis Belanda, yaitu kelompok Timur Asing (Cina, Arab, India),²⁶ dengan menumpas pengusaha pribumi, seperti Aslam dan Markam, Tambunan, mereka dipenjarakan dan perusahaannya dirampas tentara. Perusahaan pribumi tersebut lalu diberikan pada pengusaha Cina. Korban berikutnya juragan otomotif, Suwarma, bos Mercedes dan Bram Tambunan Importir VW dihabisi juga, Hasyim Ning dll. Bahkan Soeharto dalam pemberian kredit juga sangat diskriminatif. Sebagaimana dicatat oleh Richard Robison, saat pemerintah Orde Baru memberikan kredit para pengusaha pada tahun 1971. Kelompok pengusaha Cina mendapat kredit Rp. 13 Triliun,

23 Baca, Pernyataan Sikap Keluarga Besar NU, Resolusi Mengutuk Gestapu, 3 Oktober 1965, Abdul Munim DZ, *Benturan NU PKI 1948-1965*, Penerbit Langgar, Jakarta, 2013, hlm. 227.

24 Lihat, melanjutkan Rekonsiliasi alami, dalam buku Abdul Mun'im DZ, *Menghadapi Manuver Neo Komunis*, Penerbit Prakarsa, Jakarta, 2016, hlm. 78.

25 Prof. Moh. Sadli, *Mengenang Masa Pertama Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri*, Makalah Khusus, 1973.

26 Baca Soepeno Soemardjo, *Ancaman dari Utara*, Penerbit CV Karya, Jakarta, 1980, hlm. 76.

sementara kalangan pribumi hanya mendapat Rp. 1,7 Triliun. Akibatnya, 80% kredit Bank Pemerintah dikuasi Cina.²⁷ Semakin tahun Cina semakin dominan, sementara pribumi menurun hingga terjadi kebangkrutan pengusaha pribumi.

Dengan kebijakan Orde Baru yang mengutamakan pertumbuhan (pemilik modal) dan mengabaikan pemerataan (ekonomi rakyat), maka terjadilah kesenjangan besar-besaran, antara kaya dengan miskin, antara Cina dengan pribumi. Dalam kondisi seperti itu, terjadi ketimpangan dan ketidakadilan sosial, bertentangan dengan yang digariskan oleh Pancasila, yaitu keadilan sosial. Tetapi Orde Baru terus mengumandangkan retorika Pancasila, sambil menuduh selain Orde Baru dan selain pengikut Golkar dianggap bukan Pancasila. Mereka itu digolongkan sebagai ekstrem kanan (Islam) atau ekstrem kiri (PKI). Keduanya ditundukkan dengan stigma yang mematikan itu. Termasuk NU dikenai stigma anti Pancasila dituduh melakukan gerakan politik yang akan mengganti Pancasila dengan Syariat Islam, sebagaimana yang dilakukan kelompok DI-TII, sehingga gerakan sosial NU dibatasi.

Sebagai strategi menghadapi tekanan Orde Baru, pada tahun 1984 NU menyatakan kembali ke khittah 1926. NU tidak lagi menjadi bagian partai politik melainkan menjadi gerakan sosial keagamaan yang bergerak dalam

bidang dakwah dan pendidikan. Selain kembali ke khittah pada tahun 1983 NU menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi, suatu langkah berani yang belum pernah ditempuh oleh Ormas manapun baik Ormas sosial maupun keagamaan. Dengan langkah itu, NU terbebas dari stigma, selanjutnya juga bisa bergerak dengan bebas membangun kekuatan sosial, untuk memperjuangkan keadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dengan membuka berbagai usaha ekonomi termasuk mendirikan Bank Nusumma pada 1991, yaitu kerjasama antara NU dengan konglomerat Cina Edward Suryadaja.

Akan tetapi rupanya kerjasama itu tidak dikehendaki oleh Orde Baru, tidak hanya Bank Nusumma dibangkrutkan, Bank Summa yang merupakan bank swasta nasional terbesar saat itu juga dilikuidasi pemerintah tahun 1992, sehingga musnah untuk selamanya. Langkah NU untuk mengatasi kesenjangan sosial menghadapi tembok rezim Orde Baru. Akhirnya Orde Baru berjalan dengan penuh ketimpangan, walaupun ekonomi tumbuh hingga enam persen lebih, tapi terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang parah. Bagi Orde Baru, Pancasila hanya retorika, sementara praktiknya adalah kapitalis yang mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan. Ketimpangan itu kemudian merembet menjadi krisis ekonomi yang segera meledak menjadi krisis sosial dan politik yang meruntuhkan seluruh sendi politik Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan itu akhirnya jatuh ke titik nadir hingga minus 12,8 persen, dengan

27 Richard Robison, *Indonesia; The Rise of Capital*, Allaen&Unwin, Wellington, 1986, hlm. 325.

demikian berakhirlah era Orde Baru pada tahun 1998.

Di sisi lain, tumbuh gerakan Islam modernis di bawah kontrol Orde Baru dengan mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dikendalikan oleh Jenderal Soeharto dan Habibie. Tetapi gerakan Islam neo Masyumi yang moderat itu memiliki simpati pada kelompok Islam garis keras baik di level nasional maupun internasional. Kelompok keras, seperti AM Fatwa masuk ICMI, Ir. Imaduddin, Ir. Sahirul Alim dan sebagainya. Sebagian mereka ini punya jaringan erat dengan Darul Islam (DI). Keberadaan ICMI yang membawa sentimen keislaman itu mendapat tentangan dari Gus Dur karena dianggap sektarian, yang mengabaikan keragaman bangsa ini. Sementara itu perkembangan dunia Islam sudah mulai diwarnai dengan bangkitnya kelompok radikal. Selama perkembangannya, semangat Islamis dari ICMI itu menjadi sarana bagus bagi pertumbuhan *sleepers cell* (sel tidur) bagi radikalisme Islam yang selama ini menyelinap di Dewan Dakwah Islamiyah dan Persatuan Dakwah Islam di Tanjung Priok. Dengan adanya ICMI, gerakan itu muncul ibarat jamur di musim hujan.

Untuk mengantisipasi munculnya gerakan radikal Islam baik di tingkat lokal dan di tingkat internasional, NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid menyelenggarakan rapat akbar kesetiaan pada Pancasila. Langkah yang dilakukan NU itu sangat aneh, sebab saat itu Pancasila telah menjadi milik monopoli pemerintah, yang sangat dibenci oleh masyarakat,

terutama cendekiawan yang kritis. Di sisi lain juga membingungkan pemerintah, ketika ada kelompok masyarakat yang mengambil alih pekerjaan pemerintah. itu menjadikan pemerintah gamang, mau dilarang tetapi agendanya penegasan Pancasila, tetapi mau diizinkan, khawatir pemerintah Orde Baru kehilangan monopolinya atas Pancasila. Walaupun banyak dicaci oleh kalangan ICMI dan dihalangi oleh pemerintah, tetapi NU melakukan gerakan sosial di Lapangan Timur Senayan Jakarta yang melibatkan ratusan ribu peserta.

Dalam acara itu, NU mengingatkan pada pemerintah akan bahayanya Islam radikal, sebab apa yang terjadi di Aljazair, di mana partai Islam radikal bisa mengambil kekuasaan melalui mekanisme demokrasi. Hal itu harus diantisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia. Peringatan Gus Dur itu ditertawakan oleh kelompok modernis Islam, karena dianggap mimpi yang mengada-ada. Sementara diabaikan oleh Orde Baru Soeharto yang dianggap sebagai lamunan. Tetapi apa yang disampaikan Gus Dur terbukti, saat Habibie, ketua ICMI, menjadi presiden yang dikelilingi oleh kelompok neo-Masyumi itu, segera membuat keputusan yang sangat kontroversial, yaitu memberikan amnesti pada dua orang pimpinan Islam radikal, tokoh Darul Islam yang melarikan diri ke luar negeri, yaitu Abdullah Sungkar dan Abdullah Ba'asyir.²⁸ Selain itu keduanya juga direhabilitasi, sehingga

28 Lihat, As'ad Said Ali, *Al-Qaidah: Tinjauan Sosial Politik - Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2014, hlm. 178.

leluasa balik ke Indonesia, kemudian memimpin kembali pesantren. Sejak saat itu, berbagai ceramah dan brosur dikeluarkan untuk menentang Pancasila dan berusaha mengganti dengan negara Islam. Sejak saat itu berbagai teror psikologis berupa caci maki dan ancaman, serta teror fisik berupa peledakan bom, sebagaimana yang dikhawatirkan NU terjadi. Bahkan beberapa organisasi Islam radikal berdiri, kemudian menjadi partai politik dan ada yang menjadi Ormas resmi yang beroperasi sangat intensif di masyarakat. Mereka merasa aman karena sejak reformasi digulirkan demokratisasi dan kebebasan berkumpul berlaku untuk siapa saja, sehingga kelompok yang jelas anti Pancasila seperti HTI, Majelis Mujahidin, Jamaah Ansorut Tauhid, al-Qaidah dibiarkan tumbuh dan berkembang, bahkan sebagian menggunakan fasilitas negara. Pemerintahan Habibie selain membuka ancaman bagi ideologi negara dengan memelihara Islam radikal, juga mengorbankan salah satu teritori NKRI, yaitu langkahnya memerdekakan Provinsi Timor Timur, atas desakan sayap radikal dalam ICMI dan tuntutan kelompok liberal di luar.

Reformasi Pancasila

Jatuhnya rezim otoriter Orde Baru oleh gerakan Reformasi 1998, membuat kehidupan ini berubah menjadi kebebasan yang penuh anarki. Semua aspirasi dan kekesalan diekspresikan dengan geram. Masa Reformasi adalah masa pertarungan dan sekaligus pertarungan politik yang dahsyat antar

berbagai kekuatan politik yang ingin mempertahankan Pancasila dengan kelompok yang ingin menyingkirkannya. Kelompok nasionalis dan Islam nasionalis berusaha mempertahankan Pancasila. Di seberang sana kelompok Islam puritan ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Pertarungan ini terjadi justeru saat negara dilanda krisis ekonomi dan masyarakat terfragmentasi dalam berbagai kelompok dan aliran, yang telah kehilangan orientasi di tengah gelombang perubahan.

Kelompok tengah ingin kembali menormalkan kehidupan bernegara ini dengan melakukan penataan ulang. Menata kembali sistem kenegaraan sesuai dengan Pancasila dan melakukan perubahan, bahkan amandemen terhadap konstitusi seperlunya. Sementara kelompok lain menuduh Pancasila konsep diktator, yang otoriter bahkan terbukti telah melawan hak asasi manusia selama Orde Lama dan Orde Baru. Pancasila bukan produk sakral, karena itu perlu diganti.²⁹ Langkah yang dipimpin oleh Mulya Lubis itu sangat serius dengan menyiapkan UUD baru, untuk mengganti UUD 1945, termasuk mukadimah-nya yang di dalamnya terdapat Pancasila. Diganti dengan UUD baru dengan mukadimah baru yang tanpa Pancasila. Kelompok Islam dengan berbagai manuvernya dalam Kongres Umat Islam tidak kalah serunya, mereka juga mengusulkan kembalinya Piagam

²⁹ Mulya Lubis, *Pancasila, Globalisasi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah seminar Pancasila, Jakarta 1 Juni 2006.

Jakarta, sehingga perdebatan mengenai dasar negara yang pernah muncul pada awal kemerdekaan dan tahun 1950-an muncul kembali. Suasana tegang tidak bisa dihindari.

Dalam sebuah pertarungan, akhirnya kompromi terjadi bahwa UUD 1945 tidak diganti dengan UUD baru, tetapi UUD 1945 itu diamandemen dengan tetap mempertahankan mukadimahnyanya. Dalam amandemen itu terjadi pertarungan lagi antara tiga kelompok yakni Pancasilais, liberalis dan Islamis, baik di gedung parlemen maupun di luar parlemen. Langkah itu mendapatkan momentum penting karena tahun 1998 Soeharto telah menandatangani Letter of Intent (LoI) yang dipaksakan oleh Michel Camdessus Direktur *International Monetary Fund* (IMF) yang mendapatkan kebebasan melakukan redesign ekonomi, restrukturasi politik dan reorientasi budaya.

Secara perlahan tapi pasti, Pancasila yang sudah terpinggirkan Orde Baru, disingkirkan oleh rezim reformasi. Kalau selama ini setiap hukum dan undang-undang merujuk pada Pancasila, tetapi sejak LOI itu disepakati, maka LOI itulah yang dijadikan ukuran untuk melihat keabsahan hukum dan undang-undang. Celakanya, UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan LOI, maka UUD 1945 diubah berdasarkan ketentuan dalam LOI, bukan atas aspirasi bangsa sendiri. Pancasila tinggal sebagai yang lenyap secara bertahap *the end of Pancasila* (berakhirnya Pancasila). Memang untuk menyingkirkan Pancasila terlalu

riskan, membuang waktu dan banyak tantangan. Tetapi mengabaikan Pancasila menjadi pilihan. Pancasila masih ada tetapi digudangkan atau dimuseumkan, tidak pernah menjadi rujukan dalam merumuskan undang-undang, dalam mengambil kebijakan.

Dalam kondisi kacau di tengah keterpurukan Pancasila itu kalangan Islam radikal yang menganggap Pancasila sebagai *thoghut* (setan), segeramembentuk kekuatan untuk menegakkan syariat Islam sehingga dalam waktu singkat muncul berbagai peraturan daerah berdasarkan syariat Islam. Provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan memberlakukan syariat Islam, kemudian disusul Sulawesi Selatan yang membentuk Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam yang dipimpin Aziz Qahar, anak Kahar Muzakkar, pemberontak DI-TII. Gagasan itu juga didukung oleh kelompok ICMI seperti AM Fatwa, Marwah Daud Ibrahim, Jusuf Kalla, dll.³⁰ KPPSI tidak hanya ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia, tetapi juga tegak di dunia. Bersamaan dengan itu, kelompok Islam ini juga mendesakkan UU Anti Pornografi-Pornoaksi, yang berakibat menghalangi kebebasan berekspresi dalam seni, foto, lukisan, film dan pertunjukan.

Melihat gelombang Islamisasi yang begitu besar, kalangan liberal akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali memilih jalan Pancasila sebagai *minus mallum*

30 Lihat, Andy Muawiyah Ramly dkk., *Demi Ayat Tuhan, Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*, Penerbit Opsi, Jakarta 2006, hlm. 218.

(bahaya ringan) dibanding syariat Islam (bahaya besar). Saat itulah, kelompok liberal seperti Gunawan Mohamad, Rocky Gerung, Mulya Lubis mulai serius bicara Pancasila. Bukan Pancasila rumusan BPUPK, tetapi Pancasila versi liberal. Mulya Lubis segera mengusulkan *a new Pancasila* (Pancasila baru), yaitu Pancasila yang tunduk pada Konvensi Internasional tentang HAM dan sebagainya, bukan Pancasila yang digali dari sumber lokal dan tradisional.³¹ Bahkan Gadis Arivia menuntut lebih tegas lagi bahwa Pancasila harus siap menjadi liberal dan mengacu pada HAM.³² Aneka pandangan liberal tentang Pancasila itu kemudian ditegaskan dalam *Maklumat Indonesia* 1 Juni 2006.

Dengan dukungan ilmu pengetahuan, materi dan teknologi dari Barat dengan mudah menggeser Pancasila dari memori bangsa Indonesia. Dengan lenyapnya roh Pancasila dalam kehidupan bernegara ini, kehidupan ekonomi tidak semakin merata dan keadilan sosial semakin tidak terjamin. Justru sesuai dengan ketentuan IMF, negara harus menjual aset strategisnya. Negara semakin tidak berdaya melayani rakyatnya. Dengan liberalisasi ekonomi ini, pihak asing leluasa masuk dan beroperasi di negeri ini. Berbagai kesepakatan perdagangan bebas, seperti GATT, WTO, MEA diterapkan. Rakyat dilempar dalam sebuah pertarungan bebas, sehingga harus bertarung sendiri

untuk memperoleh kesejahteraan, tanpa perlindungan, tanpa arahan dan tanpa santunan dari pemerintah. Keadilan dan pemerataan semakin jauh dari harapan. Indonesia masuk dalam sebuah liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik dan liberalisasi kebudayaan, sehingga rakyat menjadi korban dalam pertarungan bebas ini. Hasilnya bisa dilihat, ketimpangan ekonomi sudah tidak terhingga lagi, kesenjangan sosial sangat ekstrem sehingga tak terjangkau lagi.

Ketidakadilan dan diskriminasi dan eksploitasi itu direspons keras oleh kelompok Islam dengan berbagai cara, ada yang halus dan banyak yang keras. Hizbut Tahrir Indonesia-HTI (Partai Pembebasan Indonesia) segera keluar dengan aksi menentang ketidakadilan. Celakanya, kesempatan ini digunakan Islam garis keras untuk konsolidasi dan sosialisasi gerakannya. Organisasi yang mempropagandakan sistem khilafah dan anti Pancasila serta NKRI itu semakin populer dan menarik minat masyarakat, karena itu beberapa kali menyelenggarakan pertemuan, baik nasional maupun lokal. Sejak awal, NU menolak kehadiran organisasi mengharamkan pengibaratan merah putih dan melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun demikian aparat negara, baik TNI maupun Polri tidak bereaksi. Melihat kenyataan itu, NU akhirnya bertindak sendiri, menolak bahkan berani melarang pelaksanaan kongres HTI walupun Polri telah mengizinkannya.

31 Lihat, Restorasi Pancasila, hlm. 353.

32 Loc, cit, hlm. 375.

Karena kegigihannya menjaga Pancasila dan NKRI, terpaksa NU berhadapan dengan pihak Polri yang membela HTI atas nama demokrasi. Dengan kegigihannya, NU bisa menghalangi pertemuan HTI. Organisasi ini berbahaya karena pengaruhnya telah begitu besar di kampus bahkan di birokrasi pemerintahan.³³ Organisasi itu menjadi tempat berkembangnya *sleeper cell* radikalisme, yang siap menghancurkan negara. Tetapi pemerintah tetap tidak peka, sehingga tetap membiarkan mereka. Sementara NU terus melakukan perlawanan. NU setiap saat harus menjelaskan pada Ormas lain, pemerintah, Polri dan TNI mengenai bahayanya HTI, karena hendak mengganti Pancasila yang diungkapkan semakin lantang.

Dengan dalih demokrasi, mereka boleh menghina Pancasila, dasar negara, merah putih sebagai lambang negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu Kebangsaan. Dengan dalih kebebasan berkumpul mereka dibiarkan kongres bahkan berdemonstrasi meramaikan Ibu Kota Jakarta. Bahkan tidak sedikit pejabat pemerintah dan petinggi aparat keamanan menjadi simpatisan dan anggota organisasi makar itu. Dengan alasan mereka baru punya gagasan mengganti Pancasila, belum melakukan, belum bisa ditindak. Padahal mereka telah menggalang kekuatan sosial di kampus, birokrasi, Polri, TNI, dan masyarakat. Ini sudah merupakan penggalangan

dan telah memengaruhi sekian banyak orang. Dengan kegigihannya itu, tekanan yang diberikan NU pada HTI akhirnya direspons pemerintah dengan pelarangan HTI, dengan menggunakan Perppu, karena tidak ada undang-Undang yang bisa digunakan untuk melarang organisasi subversif seperti itu. Sejak reformasi, undang-undang keamanan nasional dan KUHP telah tumpul akibat gerakan reformasi yang tanpa batas.

Sementara itu, gerakan yang lebih radikal baik yang berafiliasi ke Jamaah Islamiyah, al-Qaidah, termasuk yang terakhir ISIS, menyeruak di mana-mana. Bahkan dalam beberapa peristiwa di Tanah Air, kelompok itu melakukan aksi bersama dengan Islam moderat, sehingga keberadaannya diterima secara luas dan mendapatkan perlindungan semakin kuat. Forum semacam itu digunakan sebagai sarana konsolidasi. Bila hal itu terus dibiarkan, radikalisme akan semakin meluas dan terorisme akan semakin mengganas.³⁴ Langkah gerakan radikal itu semakin memperoleh angin bersamaan dengan semakin kuatnya dominasi kapitalisme dan liberalisme, yang mengundang kemarahan dan sekaligus memberikan peluang bagi gerakan radikal, yang bercita-cita menenyapkan kedzaliman dan ketidakadilan, yang dipimpin musuh mereka, yaitu Amerika Serikat.

33 Lihat Laporan dari Ahid Aktifs PCNU Bantul Yogyakarta.

34 Wawancara dengan KH. Hudallah, Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah.

Ketidakadilan Pangkal Intoleransi

Masyarakat Nusantara telah menerapkan prinsip Pancasila selama ribuan tahun lalu, tapi tanpa nama. Nama Pancasila itu ada menjelang negeri ini merdeka. Karena prinsip dasar kehidupan dijalankan dengan penuh keadilan yang dituangkan dalam konsep *memayu hayuning bawono*, menjaga ketertiban dunia, baik jagat kecil atau jagat besar, sehingga timbul ketertiban, baik hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Sekali kosmologi atau tertib sosial dan tertib alam itu dilanggar, maka runtuhlah seluruh tatanan.³⁵

Hukum dan aturan serta moralitas berjalan ketika keadaan memang aman dan saling menjaga. Tetapi bila salah satu tertib itu dilanggar, maka akan terjadi reaksi atas pelanggaran tersebut. Dengan tidak diberlakukannya keadilan, akan timbul kegoncangan, baik yang bersifat alam maupun sosial. Secara alami akan terjadi bencana alam, akibat eksploitasi berlebihan, secara sosial akan timbul gejala sosial mulai gerakan protes hingga pemberontakan. Penjajahan dan ketidakadilan yang dilakukan kapitalisme global terhadap dunia Islam itu telah melahirkan reaksi keras dari kelompok Islam radikal, sehingga menimbulkan terorisme. Radikalisme dan terorisme tidak semata muncul karena pemahaman yang menyimpang terhadap agama, tetapi lebih dari itu dipicu oleh maraknya ketidakadilan

yang dilakukan penjajah Barat terhadap dunia Islam di Palestina dan Afghanistan. Karena mereka menemui jalan buntu dalam menghadapi dominasi kapitalisme global itu, mereka melawan dengan menggunakan jalan pintas, yaitu teror atau kekerasan.

Begitu pula yang terjadi di negeri ini, sebenarnya kelompok radikal muncul sejak awal kemerdekaan, tetapi skalanya kecil. Ketika melihat ketimpangan sosial yang semakin tidak terjembatani, mereka seperti saudaranya di tempat lain, bahkan dengan bantuan mereka, melakukan kekerasan untuk jihad membela Islam. Kalau dulu peran ini dipegang oleh kelompok komunis dengan tentara merahnya. Oleh karena ideologi itu sudah tumbang, tentara merah pun sudah kehabisan semangat, maka peran itu diambil oleh kelompok Islam. Di situlah radikalisme Islam tampil beraksi dengan berbagai teror dan sabotase berdarah saat ini.

Dengan digudangkannya Pancasila, dengan tidak dijadikannya acuan dalam merumuskan undang-undang dan menerapkan kebijakan diganti dengan sistem liberal yang menghalalkan segala acara, berupa prinsip persaingan bebas itu, maka perusahaan besar melakukan berbagai manuver ekonomi yang menghempas usaha kecil dan petani kecil. Dengan dasar aturan yang berlaku, pengusaha besar diberikan izin untuk impor komoditi dengan harga murah, lalu dijual di pusat produksi petani dengan harga bantingan. Pukulan para pengusaha besar itu mematikan

35 Slamet Mulyana, *Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*, Penerbit Bratara Karya, Jakarta, 1979, hlm. 199.

petani bawang, garam, beras, cabai dan sebagainya. Mereka melakukan itu dilindungi hukum yang mereka ciptakan sendiri bersama parlemen. Begitu juga ketika membikin kawasan super blok, mereka menggusur dengan paksa tidak hanya satu dua rumah, tetapi satu RW, satu dusun yang lengkap dengan sarana perumahan rakyat, madrasah, masjid dan kantor desa. Bisa digusur dijadikan superblok milik pribadi. Bahkan tidak hanya itu kawasan perkantoran pemerintah atau aparat keamanan bisa digusur untuk membangun berbagai sarana pribadi para pengusaha. Di situ tidak hanya terjadi diskriminasi secara ekonomi, kemudian diskriminasi secara hukum dan diskriminasi secara politik, tetapi juga telah dilakukan genosida dan semuanya merupakan tindak intoleransi satu kelompok terhadap kelompok lain. Semuanya itu dianggap wajar karena dijalankan atas aturan yang sudah disiapkan. Sebaliknya, yang menggugat diskriminasi itu akan dicap sebagai rasis, dan diskriminatif dan bertindak inteloran. Itulah hakekat isu intoleransi Indonesia saat ini.

Gejala semacam itu dicatat dengan rapi, dan terus disosialisasikan lewat berbagai forum, mulai pengajian di masjid hingga pengajian umum, sampai di media sosial yang sangat luas jangkauannya. Dengan dukungan kaum intelektual kampus, data yang mereka miliki semakin kaya dan ditata dengan rapi sebagai sarana menyulut api jihad. Suhu panas terus dikobarkan, suasana permusuhan digodok terus hingga

mendidih. Dengan dalih ketidakadilan diberlakukan pada umat Islam, mereka mencari berbagai cara melakukan pembalasan. Mereka juga tidak peduli dituduh tidak toleran, dan ekstrimis, karena toleransi terbukti telah memakan diri sendiri. Mereka ini juga mencurigai, pluralisme dan toleransi hanya sebagai strategi kelompok minoritas dalam melanggengkan diskriminasi yang mereka lakukan selama ini, sehingga mereka sebagai mayoritas menjadi korbannya. Padahal selama ini mereka merasa telah memberikan terlalu banyak toleransi.

Sayang gejala itu kurang dipahami, sehingga muncul anggapan, baik dari aktivis nasional maupun internasional bahwa umat Islam Indonesia sudah mengalami intoleransi. Berbagai survei dan penelitian kemudian diselenggarakan untuk menunjukkan gejala maraknya intoleransi itu, sehingga Dewan HAM PBB pun ikut berteriak terhadap fenomena itu. Karena itu tidak mengherankan masyarakat Indonesia geram terhadap pernyataan beberapa LSM lokal dan internasional dalam sidang PBB di Jenewa tahun 2012 yang menuduh Indonesia sebagai negara yang intoleran. Saat itu pemerintah merasa dipermalukan. KH Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU menjawab:

“Saya sangat menyayangkan tuduhan intoleransi agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu pasti mendapat laporan dari orang-orang Indonesia. Menurut Hasyim, tidak ada negara di dunia ini yang lebih

toleran dari Indonesia dalam beragama. "Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim manapun yang setoleran Indonesia," jelasnya.

Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan pendirian menara masjid. Indonesia, katanya, juga lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan jilbab, dan lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia yang tak menghormati agama karena disana ada UU perkawinan sejenis. "Agama mana yang memperkenankan perkawinan sejenis? Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia dan kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas, membedakan mana HAM yang benar humanisme dan mana yang sekedar westernisme,"³⁶

Kebebasan yang diterapkan saat ini bukan kebebasan *dari* (kemiskinan, ketertindasan, keterbelakangan), melainkan bebas *untuk* (berkompetisi, mendiskriminasi, eksploitasi). Akibatnya yang terjadi adalah anarki, karena ketika satu kelompok bebas melakukan eksploitasi, represi dan mendiskriminasi, maka kelompok Islamis juga bebas melakukan diskriminasi, teror dan intimidasi. Keduanya memang sama-sama menggunakan kekerasan sebagai sarana penguasaan. Kalau kelompok kapitalis melakukan kekerasan struktural, sehingga kelihatan lembut. Sementara kelompok radikal menggunakan kekerasan fisik, berupa

teror dan intimidasi, sehingga kelihatan kasar. Benturan dua kekuatan itu akan terus terjadi kalau tidak ada yang meleraikan. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara menyediakan saran itu, hanya saja Pancasila selama ini dia-baikan.

Pada dasarnya Indonesia sejak dulu hingga kini telah mengenal toleransi, karena hal itu sudah merupakan watak, baik watak tradisi Nusantara maupun watak dari umat Islam sendiri. Bayangkan sejak Indonesia mempersiapkan kemerdekaan. Kelompok non Muslim terlibat aktif dalam BPUPK, tidak hanya itu, kelompok ras Cina, Arab bahkan Eropa diberi tempat. Padahal hingga saat ini berbagai negara maju belum bisa memberikan kedudukan terhadap komunitas Muslim secara sederajat. Dalam politik Indonesia saat ini berbagai pejabat eksekutif di parlemen dan di lembaga yudikatif dengan leluasa diduduki non Muslim. Ini adalah bentuk toleransi yang perlu dipertahankan, tetapi jangan sampai melampaui batas, karena toleransi berarti keseimbangan, sekali keseimbangan itu dilanggar maka keadilan sudah dilanggar. Ketika keadilan dilanggar, maka kegoncangan akan terjadi.

Kembali ke Khittah 1945

Posisi Pancasila sebagai falsafah, dengan sendirinya merupakan jawaban bahkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini. Sebaliknya, bangsa ini bermasalah ketika menjauhi prinsip yang disepakati sendiri. Melihat kenyataan itu, secara serius NU dalam Munas di Cirebon 2012 mengajukan jalan keluar pada

36 Lihat, Nu Online, 30 Mei 2012.

bangsa ini agar kembali ke khittahnya, yaitu Khittah Indonesia 1945. Bangsa ini telah memiliki khittah yang jelas, yaitu kembali pada semangat proklamasi, falsafah Pancasila, spirit Mukadimah UUD 1945, berpedoman batang tubuh UUD 1945, perpegang pada budaya dan tradisi.³⁷ Khittah ini sudah seharusnya mewarnai kehidupan bangsa sehari-hari. Tetapi dengan terjadinya Reformasi yang semula dimaksudkan untuk kembali ke jati diri, malah sebaliknya, semakin menjauh dari jati diri, karena tidak kembali ke Khittah Indonesia sendiri tetapi mengikuti skema IMF yang terlanjur disepakati Soeharto dan kaum reformis sendiri.

Langkah yang diajukan NU untuk kembali ke Khittah Indonesia itu adalah; pertama, kembali kepada komitmen awal, yaitu kembali kepada UUD 1945, selanjutnya diamandemen secara prosedural, merujuk pada nilai dan tradisi yang ada. Selanjutnya, usul agar berbagai undang-undang turunan dari amandemen, baik undang-undang Migas, SDA, Perbankan, BUMN dan sebagainya yang saat itu berjumlah 12 undang-undang itu diusulkan untuk dibatalkan. Gagasan itu menggegerkan pemerintah, akhirnya Presiden SBY yang tidak diundang dalam Munas itu datang sendiri ke Cirebon, memantau perkembangan bahtsul masail yang membahas tema dasar itu. Gagasan itu tidak bisa dicegah apalagi digagalkan pemerintah, akhirnya keluar sebagai

keputusan Munas NU. Saat itulah, Presiden dihadirkan di arena Munas sengaja diminta untuk merespons usulan NU itu.

Dengan diplomatis Presiden menjawab, bahwa dirinya bukan Bung Karno sehingga tidak cukup berani untuk mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945. Kemudian mengenai usul pembatalan 12 undang-undang itu, Presiden beralih kewenangan membatalkan Undang-undang bukan di Presiden melainkan di DPR dan MPR, NU dipersilahkan untuk menghadap ke sana. Ada juga pihak lain yang menggugat berbagai undang-undang itu dan membawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review*, dan berhasil, sayang tidak bisa dieksekusi, karena kekuatan kapitalis telah sedemikian kokoh. Karena itu, NU menempuh jalur lain, yaitu memperkuat gerakan sosial, agar kelompok ini ke depan juga bisa menjadi kekuatan penekan, untuk memperjuangkan keadilan sosial.

Dengan membawa persoalan dasar Konstitusi dan dasar negara Pancasila itu sebenarnya NU ingin kembali menormalkan dan menyeimbangkan lagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan merajalelanya ketimpangan mengundang hadirnya kelompok radikal Islam sebagai penantang, sehingga negara ini akan menghadapi ancaman terus. Demokrasi reformasi yang merupakan demokrasi liberal yang menggelar kebebasan tanpa batas, juga melahirkan ancaman yang tanpa batas. Ketika aksi reaksi terus terjadi, tanpa ada solusi, sehingga

37 Lihat, *Rancangan Dasar, dan Frame Works Munas NU*, Cirebon 2012.

menghancurkan *equilibrium* (keseimbangan) sosial. Sementara dalam sistem kemasyarakatan NU memiliki prinsip yang jelas, yaitu *tawassuth*, (moderat), *tawazun* (seimbang) dan *tasamuh* (toleran) serta prinsip pengikatnya, yaitu *amar makruf nahi munkar*. Di situ NU berkeajiban menegakkan keseimbangan, jalan tengah dan toleransi, dan sekaligus bertindak tegas bagi mereka yang melanggarnya. Atas dasar amar makruf nahi munkar itu untuk menjaga harmoni sosial dan harmoni dalam bernegara.

Dalam masyarakat harmoni, kebebasan seseorang atau kelompok dibatasi oleh kebebasan yang lain, tetapi dalam masyarakat liberal kompetitif, kebebasan seseorang atau kelompok ditandingi dengan kebebasan yang lain, maka terjadilah anarki bahkan konflik. Kasus ini tidak hanya terjadi di ranah sosial, tetapi terjadi juga di ranah ekonomi dan politik, sehingga terjadi politik Machiavellis. Untuk mengatasi kebebasan tanpa batas yang anarkhis semacam itu, para *founding fathers* kita sejak negara ini menjelang berdiri telah menetapkan batas-batas kebebasan, yaitu: (1) batas kepentingan-kepentingan rakyat banyak; (2), batas keselamatan negara; (3), batas kesusilaan; (4), batas kepribadian bangsa; (5), batas pertanggungjawaban kepada Tuhan.³⁸ Dengan adanya batasan itu, kehidupan menjadi harmoni, karena saling menjaga kehormatan dan saling menenggang

satu sama lain. Tidak terjadi mutlak-mutlakan. Tugas para pemimpin bangsa ini untuk menjaga harmoni, dan Pancasila merupakan sarana jitu untuk itu.

Pilkada DKI Jakarta telah menggelar drama politik yang tragis, di mana terjadi pertarungan antara pihak yang mendukung kebebasan, dan kelompok radikal yang menolak kehadiran pemimpin non muslim. Perbedaan meruncing menjadi ketegangan yang mengancam keamanan nasional. Peristiwa ini hanya merupakan fragmen awal dalam drama politik nasional, yang akan terus dipentaskan pada babak berikutnya, baik Pemilu legislatif terutama pemilihan presiden. Kalau ketegangan itu terus dikobarkan maka tidak menutup kemungkinan akan pecah menjadi konflik. Dalam situasi seperti ini semestinya kelompok Pancasilais segera memberikan solusi, agar ketegangan itu tidak meningkat menjadi konflik. Celaknya dalam situasi dramatik seperti ini kelompok Pancasilais kehilangan arah, dan tidak memiliki kekuatan untuk mediasi.

Pancasila kembali menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi ketegangan politik ini. Tentu saja langkah terpenting adalah; pertama, melakukan reedukasi sosial, restrukturisasi sistem ketatanegaraan; ketiga, penggalangan daya ekonomi rakyat. Ini merupakan agenda jangka panjang karena mencakup berbagai bidang kehidupan yang membutuhkan penataan. Sebuah tatanan baru yang diilhami dan dijiwai oleh Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa.

38 Prof. Muhammad Yamin, *Risalah Persiapan UUD 1945 Jilid I*, Kementerian Penerangan RI, Jakarta 1959, hlm. 688..